

**Makalah Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama –  
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kupang**

---

**OPTIMALISASI SUMBER DAYA PERIKANAN  
KABUPATEN KUPANG: RENCANA STRATEGIS  
MEWUJUDKAN KEDAULATAN EKONOMI RAKYAT,  
SDM BERDAYA SAING, DAN PENGUATAN FISKAL  
DAERAH SESUAI VISI DAN MISI BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUPANG**

---

Oleh:

Rey Oistar W. Malelak, S.Pi

NIP. 197212182000121001.

Jabatan Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan Kabupaten Kupang

# DAFTAR ISI

MAKALAH SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA – KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUPANG.....	1
OPTIMALISASI SUMBER DAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KUPANG: RENCANA STRATEGIS MEWUJUDKAN KEDAULATAN EKONOMI RAKYAT, SDM BERDAYA SAING, DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH SESUAI VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
KATA PENGANTAR .....	5
EXECUTIVE SUMMARY .....	7
1. Isu Strategis Utama ( <i>The Gap</i> ).....	7
2. Rencana Strategis dan Program Unggulan ( <i>Blue Economy Blueprint</i> ) .....	7
2. Rencana Strategis dan Program Unggulan ( <i>Blue Economy Blueprint</i> ).....	8
3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Jangka Menengah (2030).....	9
BAB I. PENDAHULUAN .....	10
A. Latar Belakang dan Urgensi Optimalisasi Sektor Kelautan .....	10
B. Perumusan Masalah .....	17
C. Tujuan (Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang).....	17
D. Kegunaan .....	18
E. Kerangka Konseptual/Konseptual.....	18
BAB II. LANDASANPENULISAN .....	20
A. Landasan Yuridis / Konstitusional .....	20
B. Landasan Pustaka, Teori, dan Kerangka Konseptual.....	21
BAB III. PEMBAHASAN .....	29
A. Isu Strategis terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang .....	29

A.1. Analisis Mendalam terhadap Isu Keterbatasan Infrastruktur dan Efisiensi Hulu.....	29
A.2. Analisis Risiko Sumber Daya dan Inovasi Data.....	30
A.3. Analisis Kesenjangan Tata Kelola Fiskal dan Digitalisasi PAD .....	30
B. Melakukan Analisis Terhadap Isi Strategis Dengan Output Dan Outcome Terukur Dan Berdampak Serta Memiliki Inovasi Yang Mudah Di Implementasikan. ....	32
B.1. Program Kedaulatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan (Mendukung Misi 2) .....	32
B.2. Program Industrialisasi dan Logistik Perikanan Berbasis Blue Economy (Mendukung Misi 2) .....	32
B.3. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan (Mendukung Misi 1).....	33
B.4. Program Penguatan Fiskal Daerah dan Tata Kelola (Mendukung Misi 4).....	34
C. Rencana Strategis Pencapaian Target Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang.	36
C.1. Peta Jalan Implementasi Program Blue Economy Berbasis Komunitas (2025–2030). .....	36
C.2. Kerangka Anggaran dan Sumber Pendanaan.....	37
C.3. Penguatan Tata Kelola ( <i>Good Governance</i> ) dan Akuntabilitas.....	37
C.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Jangka Menengah .....	38
BAB VI. PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Mendesak.....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	39

# DAFTAR TABEL

Excecutive Summary 1 Program Unggulan (BEBK) Berdasarkan Pilar Misi	8
Excecutive Summary 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Pilar Sasaran	9
Excecutive Summary 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) – Pilar Sasaran	9
Tabel 1 1 Kerangka Konseptual	18
Tabel 4 1 Program Kedaulatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan (Mendukung Misi 2)	32
Tabel 4 2 Program Industrialisasi dan Logistik Perikanan Berbasis Blue Economy	33
Tabel 4 3 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan (Mendukung Misi 1)	33
Tabel 4 4 Program Penguatan Fiskal Daerah dan Tata Kelola (Mendukung Misi 4)	34
Tabel 5 1 Peta Jalan Implementasi Program Blue Economy Berbasis Komunitas	36
Tabel 5 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Jangka Menengah	38

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Makalah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kupang ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban dan komitmen kinerja yang berlandaskan pada analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan strategis sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Kupang.

Kabupaten Kupang memiliki keunggulan geografis yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai **fondasi material** perekonomian daerah, dengan kontribusi mencapai puncaknya hingga **44 %** dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023. Dominasi struktural ini secara eksplisit menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah—terutama **Misi 2 (Kedaulatan Ekonomi Rakyat)** dan **Misi 1 (SDM Berkualitas)**—sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sektor ini.

Makalah ini merumuskan **Rencana Strategis Optimalisasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang** melalui adaptasi filosofis **Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK)**. Strategi ini dirancang untuk secara tuntas mengatasi empat isu strategis utama yang menghambat pencapaian *\$outcome\$* kesejahteraan dan tata kelola, yaitu:

1. **Inefisiensi Operasional Kritis** (terutama non-fungsionalitas fasilitas perbengkelan).
2. **Volatilitas Produksi** komoditas unggulan yang *irregular dan tidak stasioner*.
3. **Kesenjangan Tata Kelola Fiskal** yang menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan manual Retribusi Jasa Usaha TPI.
4. **Kesenjangan Kompetensi SDM Vokasi** untuk mengelola infrastruktur kritis.

Inovasi utama yang diajukan dalam makalah ini adalah:

- **Digitalisasi Fiskal (E-Retribusi Terpadu)** : Sebagai solusi *Good Governance* untuk menghilangkan *leakage* dan *undervaluation* serta meningkatkan kontribusi PAD minimal 15 % per tahun.
- **Reaktivasi Fasilitas Kritis**: Fungsionalisasi perbengkelan sebagai *quick win* yang akan menurunkan Biaya Operasional (*Opex*) nelayan hingga 15 %.
- **Manajemen Sumber Daya Berbasis Sains**: Adopsi model peramalan canggih (Polinomial Orde 4/5) untuk perencanaan adaptif.

Pada akhirnya, strategi ini memiliki satu fokus *outcome* tunggal, yaitu mewujudkan **Kedaulatan Ekonomi Rakyat** yang terukur melalui peningkatan **Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga mencapai angka  $\geq 115$** , yang merupakan refleksi langsung dari peningkatan daya beli dan kesejahteraan nelayan.

Besar harapan kami, makalah ini dapat menjadi **Blue Economy Blueprint** yang akuntabel dan terukur, serta menjadi instrumen nyata bagi implementasi program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kupang. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Kupang, 21 Oktober 2025

Hormat kami,

**Rey Oistar W. Malelak, S.Pi**

# EXECUTIVE SUMMARY

## ***Optimalisasi Sumber Daya Perikanan Kabupaten Kupang: Rencana Strategis Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat, SDM Berdaya Saing, dan Penguatan Fiskal Daerah Sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang***

Makalah ini menyajikan peta jalan strategis untuk mentransformasi sektor perikanan Kabupaten Kupang, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi tertinggi di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 44% dari total PDRB. Strategi ini dirumuskan untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Kupang dan menjawab tiga Misi utama yang relevan: **Misi 1 (SDM Berkualitas)**, **Misi 2 (Kedaulatan Ekonomi Rakyat)**, dan **Misi 4 (Good Governance)**.

## **1. Isu Strategis Utama (*The Gap*)**

Meskipun potensinya besar, sektor perikanan dihadapkan pada empat tantangan struktural:

1. **Inefisiensi Operasional Kritis:** Fasilitas infrastruktur hulu, khususnya **fasilitas perbengkelan di sentra pendaratan (PPI/TPI)**, masih non-fungsional, yang secara langsung meningkatkan Biaya Operasional (*Opex*) nelayan dan menekan **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**.
2. **Risiko Pasokan dan Hilirisasi:** Pola produksi komoditas unggulan (Tuna, Cakalang) yang *irregular* dan *tidak stasioner* meningkatkan risiko investasi logistik dan menghambat transformasi ekonomi dari *raw commodity* menuju ekonomi berbasis nilai tambah (hilirisasi).
3. **Kebocoran Fiskal Daerah:** Pungutan **Retribusi Jasa Usaha TPI (tarif 5%)** yang masih manual, rentan terhadap *leakage* dan *undervaluation*, sehingga kontribusi terhadap PAD sub-optimal dan bertentangan dengan prinsip *Good Governance*.
4. **Kesenjangan SDM:** Keterbatasan tenaga teknis bersertifikat untuk mengoperasikan fasilitas penting seperti *cold storage* dan fasilitas perbengkelan yang akan direaktivasi.

## **2. Rencana Strategis dan Program Unggulan (*Blue Economy Blueprint*)**

Solusi yang diusulkan adalah implementasi **4 Program Unggulan Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK)**, dengan fokus pada inovasi digitalisasi dan reaktivasi infrastruktur kritis:

*Executive Summary 1 Program Unggulan (BEBK) Berdasarkan Pilar Misi*

Pilar Misi	Program Unggulan (BEBK)	Kegiatan Kunci	Inovasi
<b>Misi 4 &amp; 2</b>	Penguatan Fiskal dan Tata Kelola	1. Implementasi <i>E-Retribusi</i> Terpadu TPI. 2. Reviu dan Harmonisasi Perda Retribusi Jasa Usaha (sesuai UU HKPD No. 1/2022).	Digitalisasi Fiskal
<b>Misi 2</b>	Industrialisasi & Logistik Perikanan	1. Reaktivasi kritis fasilitas perbengkelan di PPI/TPI. 2. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) komunitas.	<i>Quick Win</i> Operasional
<b>Misi 1</b>	Peningkatan Kualitas SDM & Kelembagaan	1. Kemitraan vokasi dengan Politeknik KP Kupang (sertifikasi teknisi <i>cold chain</i> dan perbengkelan). 2. Pemberlakuan kebijakan insentif SDM terpencil.	Aplikasi Vokasi
<b>Misi 2</b>	Kedaulatan Sumber Daya	1. Penerapan model peramalan canggih (Polynomial Orde 4/5) untuk manajemen stok ikan adaptif. 2. Perluasan kawasan konservasi lokal.	Manajemen Data Berbasis Sains

## 2. Rencana Strategis dan Program Unggulan (*Blue Economy Blueprint*)

Solusi yang diusulkan adalah implementasi **4 Program Unggulan Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK)**, dengan fokus pada inovasi digitalisasi dan reaktivasi infrastruktur kritis:



*Executive Summary 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Pilar Sasaran*

Pilar Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Jangka Menengah
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sektor Perikanan	$\geq 115$ (meningkatnya daya beli nelayan)
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Persentase Penurunan Opex Nelayan (dari reaktivasi perbengkelan)	15%
<b>Penguatan Fiskal Daerah (Misi 4)</b>	Persentase Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Usaha Kelautan	Peningkatan minimal 15% per tahun
<b>Penguatan Fiskal Daerah (Misi 4)</b>	Nilai Indeks Transparansi <i>E-Retribusi</i> TPI	90
<b>SDM Berdaya Saing (Misi 1)</b>	Persentase Volume Produksi yang Dihilirisasi (melalui SKPT)	40%

### 3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Jangka Menengah (2030)

Keberhasilan strategi diukur melalui fokus pada *outcome* strategis, sejalan dengan Visi/Misi daerah:

*Executive Summary 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) – Pilar Sasaran*

Pilar Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Jangka Menengah
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sektor Perikanan	$\geq 115$ (peningkatan daya beli nelayan)
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Persentase Penurunan Opex Nelayan (dari reaktivasi perbengkelan)	15%
<b>Penguatan Fiskal Daerah (Misi 4)</b>	Persentase Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Usaha Kelautan	Peningkatan minimal 15% per tahun
<b>Penguatan Fiskal Daerah (Misi 4)</b>	Nilai Indeks Transparansi <i>E-Retribusi</i> TPI	90
<b>SDM Berdaya Saing (Misi 1)</b>	Persentase Volume Produksi yang Dihilirisasi (melalui SKPT)	40%

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang dan Urgensi Optimalisasi Sektor Kelautan

### 1. Potensi Sumber Daya dan Ketergantungan Struktur PDRB

#### a. Fondasi Ekonomi Regional dan Dominasi Sektor Primer

Kabupaten Kupang memiliki keunggulan geografis yang signifikan, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian. Potensi ini bukan hanya sekadar klaim, melainkan fakta yang tercermin secara eksplisit dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Kategori A, yang mencakup Pertanian, Kehutanan, dan **Perikanan**, merupakan basis perekonomian yang mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Kupang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini mencapai puncaknya hingga **44% dari total PDRB pada tahun 2023**<sup>1</sup>, menunjukkan peningkatan sekitar 0,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan kontribusi ini salah satunya didorong oleh peningkatan volume produksi dibandingkan tahun 2022.<sup>1</sup>

Angka 44% ini menegaskan bahwa sektor perikanan tidak dapat dipandang sebagai variabel minor, melainkan sebagai **fondasi material** yang menentukan stabilitas dan *multiplier effect* ekonomi regional. Setiap fluktuasi kinerja di sektor ini memiliki konsekuensi langsung terhadap 7,95% pertumbuhan PDRB nominal yang dicapai Kabupaten Kupang pada tahun 2023.<sup>1</sup> Keberhasilan mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah—terutama **Misi 2 (Kedaulatan Ekonomi Rakyat)**—secara matematis dan struktural sangat tergantung pada efektivitas pengelolaan dan peningkatan nilai tambah dari sektor primer ini.

#### b. Kesenjangan Pertumbuhan Nilai Tambah Riil dan Tekanan Harga

Meskipun kontribusi PDRB-nya dominan, Kabupaten Kupang dihadapkan pada tantangan kesenjangan antara potensi nominal dan pertumbuhan nilai tambah riil. Pada tahun 2023, pertumbuhan PDRB riil (*Atas Dasar Harga Konstan*, ADHK) Kabupaten Kupang hanya sebesar **3.55%**.<sup>1</sup> Angka pertumbuhan riil ini relatif moderat, terutama setelah melihat bahwa indeks implisit (kenaikan harga barang dan jasa, atau inflasi produsen) di Kabupaten Kupang meningkat signifikan, mencapai **4.25% pada tahun 2023**.<sup>1</sup>

Kondisi ini menyiratkan adanya dua risiko besar:

1. **Ekonomi Bahan Mentah (*Raw Commodity Economy*):** Pertumbuhan PDRB yang tinggi dalam nominal (7.95%) tetapi rendah dalam riil (3.55%) menunjukkan bahwa sebagian

besar pendapatan daerah terserap oleh kenaikan harga (*implicit index*), dan bukan oleh penciptaan nilai tambah baru yang signifikan. Ini adalah indikator bahwa produk perikanan mayoritas masih dijual mentah atau semi-mentah, dan Kabupaten Kupang belum secara optimal bertransformasi menjadi ekonomi berbasis hilirisasi (*value-added economy*).

2. **Kerentanan Daya Beli:** Kenaikan harga barang dan jasa (indeks implisit) yang cenderung meningkat<sup>1</sup> menempatkan tekanan pada daya beli masyarakat, khususnya nelayan. Situasi ini secara langsung mengancam **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**<sup>3</sup>, yang merupakan rasio daya beli nelayan. Jika harga barang yang dibayar nelayan terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan harga jual hasil tangkapan (melalui hilirisasi), maka NTN akan melemah, menghambat pencapaian Kedaulatan Ekonomi Rakyat.

#### c. Mandat Struktur PDRB terhadap Perencanaan Strategis

Ketergantungan struktur PDRB pada sektor Perikanan menuntut pendekatan perencanaan strategis yang terintegrasi dan akuntabel. Kerangka perencanaan pembangunan daerah, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus secara eksplisit memuat *Kerangka pendanaan pembangunan* dan *program perangkat daerah* yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif.<sup>4</sup> Ini menjadi dasar pertanggungjawaban bagi perangkat daerah, memastikan bahwa dominasi PDRB perikanan diterjemahkan menjadi kesejahteraan riil dan tata kelola yang efektif.

## 2. Sinkronisasi dengan Agenda Global dan Nasional (Blue Economy)

#### a. Posisi Indonesia sebagai Kekuatan Maritim Global

Strategi pembangunan perikanan Kabupaten Kupang harus selaras dengan agenda global dan nasional, terutama konsep **Blue Economy (Ekonomi Biru)**. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok.<sup>5</sup> Kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional sangat substansial, menyumbang sebesar **US\$27 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional** dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan.<sup>5</sup> Angka-angka ini memosisikan Indonesia sebagai pemain kunci yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

#### b. Landasan Filosofis dan Ideasi *Epicentrum of Growth*

Pemerintah Indonesia secara aktif menyebarkan konsep *Blue Economy* sebagai strategi utama pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta sebagai sumber peluang untuk menjadikan kawasan ini sebagai *Epicentrum of Growth*.<sup>6</sup> Konsep ini didasarkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan yang dilandaskan pada prinsip ekologi.<sup>5</sup> Ini adalah pergeseran filosofis dari model "ekonomi coklat" (ekonomi ekstraktif dan eksploitatif) menuju model *Blue Economy* yang menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan harus seiring dengan daya dukung lingkungan. Bahkan, laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam, di mana terumbu karang dan mangrove memberikan perlindungan yang bernilai setidaknya **US\$639 juta per tahun**<sup>5</sup>, menggarisbawahi urgensi konservasi.

Melalui *Blue Economy*, Indonesia berupaya menciptakan kesamaan pandangan di tingkat ASEAN, menekankan narasi **persatuan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama** untuk memajukan agenda regional.<sup>6</sup> Indonesia juga berharap dapat mengajak negara-negara lain, khususnya melalui forum negara-negara pulau dan kepulauan, untuk membuat **protokol implementasi blue economy sebagai agenda global**.<sup>5</sup>

#### c. Peta Jalan KKP dan Mandat Lingkungan/Komunitas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerjemahkan konsep ini ke dalam peta jalan (roadmap) pengelolaan laut secara berkelanjutan, yang mencakup lima program prioritas berlandaskan ekologi.<sup>5</sup> Program yang paling relevan dan terukur untuk implementasi di Kabupaten Kupang adalah:

1. **Perluasan Kawasan Konservasi Laut:** Target ambisius perluasan kawasan konservasi laut sebanyak **30%** yang ditargetkan tercapai pada tahun 2045.<sup>5</sup> Strategi daerah harus mendukung target ini, misalnya melalui penetapan zona konservasi lokal dan pengelolaan kawasan pesisir secara lestari.
2. **Pengelolaan Berbasis Hak (*Rights-based Management*):** KKP juga fokus pada pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak untuk nelayan.<sup>5</sup> Hal ini memberikan justifikasi penuh terhadap pendekatan **Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK)**. BEBK memastikan bahwa nelayan kecil dan masyarakat pesisir ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan (*bottom-up*), yang berhak atas pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan, sejalan dengan konsep Ekonomi Kerakyatan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, strategi optimalisasi sumber daya perikanan Kabupaten Kupang bukan hanya memenuhi kebutuhan lokal (meningkatkan PDRB 44%<sup>1</sup>), tetapi juga merupakan manifestasi taktis dari komitmen Indonesia sebagai pemimpin maritim global dalam

mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3. Kondisi Eksisting dan Tantangan Utama Sektor Perikanan Kabupaten Kupang

Saat ini, sektor perikanan Kabupaten Kupang menghadapi empat tantangan strategis utama yang menghambat pencapaian *outcome* kesejahteraan dan tata kelola:

#### 3.1. Kesenjangan Infrastruktur Hulu dan Inefisiensi Operasional Kritis

Meskipun secara umum fasilitas infrastruktur perikanan di wilayah Kupang tergolong lengkap, efektivitas operasional di tingkat hulu masih sangat rendah akibat adanya *bottleneck* infrastruktur kritis yang non-fungsional.

- **PPI Oeba sebagai Hub Regional:** Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, yang secara geografis berada di Kota Kupang, berfungsi sebagai hub pendaratan utama bagi nelayan di wilayah Kabupaten Kupang. Ketersediaan fasilitas di PPI Oeba, seperti fasilitas dasar dan fungsional, **tergolong lengkap**.<sup>8</sup>
- **Kegagalan Fasilitas Perbengkelan (*The Critical Bottleneck*):** Evaluasi kinerja fasilitas menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan beberapa fasilitas tidak digunakan, terutama fasilitas fungsional berupa perbengkelan.<sup>8</sup> Non-fungsionalitas perbengkelan ini merupakan kegagalan operasional yang berdampak besar.
- **Dampak Kritis terhadap NTN:** Ketika kapal nelayan mengalami kerusakan, mereka dipaksa mencari layanan perbaikan di luar kawasan pendaratan, yang meningkatkan Biaya Operasional (*Opex*) dan mengurangi waktu efektif melaut (*non-productive time*). Peningkatan *Opex* ini secara langsung **menekan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan**, dan jika tidak diimbangi harga jual yang lebih tinggi, akan menyebabkan **penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN)**<sup>3</sup>, yang merupakan tolok ukur utama kedaulatan ekonomi rakyat. Keterbatasan infrastruktur hulu ini menghambat Misi 2 (Kedaulatan Ekonomi).

#### 3.2. Volatilitas Produksi, Risiko Stok Ikan, dan Kebutuhan Inovasi Data

Sektor perikanan Kupang menghadapi ketidakpastian pasokan yang tinggi, yang disebabkan oleh karakteristik sumber daya yang unik.

- **Irregularitas dan Non-Stasioneritas:** Komoditas unggulan utama NTT yang didaratkan di kawasan Kupang, yaitu Ikan Tuna, Cakalang, dan Kerapu, memiliki **pola produksi yang irregular dan tidak stasioner** dari tahun ke tahun.<sup>9</sup> Sebagai contoh empiris,

produksi Ikan Tuna mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 namun kemudian menurun kembali pada tahun 2018, dan seterusnya semakin menurun pada tahun 2019.<sup>9</sup>

- **Dampak Risiko Investasi:** Pola yang tidak teratur ini menimbulkan risiko besar dalam perencanaan bisnis, investasi logistik (khususnya kapasitas *cold storage* dan unit pengolahan), dan stabilisasi harga. Fluktuasi pasokan yang tinggi (irregularitas) membuat perencanaan konvensional berbasis rata-rata gagal dan menghambat upaya hilirisasi.
- **Kebutuhan Inovasi Data:** Untuk mengatasi risiko ini, perencanaan manajemen perikanan harus bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi adaptif, menuntut adopsi **Model Peramalan Canggih**, seperti Model Polinomial Orde 4 untuk Tuna dan Orde 5 untuk Cakalang, yang terbukti paling mendekati dalam memprediksi produksi.<sup>9</sup> Rendahnya inovasi data ini menghambat Misi 2 (Kedaulatan Ekonomi).

### 3.3. Tantangan Tata Kelola Fiskal dan Kebocoran PAD

Meskipun dasar hukum pungutan Retribusi Jasa Usaha TPI telah ada, kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi masih sub-optimal.

- **Dasar Hukum dan Tarif Pungutan:** Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha secara eksplisit mengatur **Retribusi Tempat Pelelangan**.<sup>10</sup> Pasal 23 Perda tersebut menetapkan struktur tarif sebesar **5% dari hasil lelang** (2% penjual dan 3% pembeli).<sup>10</sup>
- **Kegagalan *Good Governance* dalam Pungutan:** Masalah utama terletak pada implementasi. Sistem pungutan yang masih manual rentan terhadap **kebocoran (*leakage*)** dan **transaksi *by-pass*** (di luar mekanisme TPI resmi) yang menyebabkan *undervaluation* hasil tangkapan.
- **Implikasi Transparansi dan Akuntabilitas:** Kurangnya sistem monitoring transaksi yang terpadu dan proses manual dalam pemungutan sangat bertentangan dengan prinsip *Good Governance*—yakni **efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas**—yang diamanatkan Misi 4 Pemerintah Daerah.<sup>11</sup> Kesenjangan ini menghambat penguatan fiskal daerah, yang dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan perikanan itu sendiri.

### 3.4. Kualitas SDM dan Kesenjangan Kompetensi Vokasi

Daya saing sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan.

- **SDM Tradisional dan Kebutuhan Industri:** Mayoritas nelayan masih mengandalkan teknologi penangkapan dan penanganan hasil yang tradisional, yang berkontribusi pada

rendahnya nilai jual dan tingginya *post-harvest loss*.

- **Kesenjangan Kebutuhan Vokasi:** Meskipun Kabupaten Kupang memiliki aset strategis berupa **Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang** <sup>13</sup>—sebagai bentuk pendidikan tinggi yang menitikberatkan pada program vokasi dengan **kompetensi bersertifikat** <sup>13</sup>—terdapat kesenjangan antara kurikulum vokasi dan kebutuhan teknis mendesak di lapangan. SDM yang dibutuhkan untuk mengoperasikan *cold storage* yang terintegrasi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan, yang lebih penting, untuk mereaktivasi **fasilitas perbengkelan** <sup>8</sup>, belum tersedia dalam jumlah yang memadai.
- **Dampak pada Misi 1:** Kesenjangan ini secara langsung menghambat pencapaian Misi 1 (SDM Berkualitas), yang harus diatasi melalui sinkronisasi kurikulum vokasi dengan kebutuhan infrastruktur kritis daerah, serta melalui penerapan kebijakan insentif bagi tenaga teknis yang ditempatkan di wilayah pesisir terpencil.<sup>14</sup>

#### 4. Kondisi yang Diharapkan (Sesuai Visi/Misi)

Kondisi yang Diharapkan merupakan manifestasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kupang yang menekankan pada "Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan," <sup>15</sup> yang diterjemahkan melalui tiga Misi utama yang harus dijawab oleh sektor perikanan: Misi 1 (SDM Berkualitas), Misi 2 (Kedaulatan Ekonomi), dan Misi 4 (Good Governance).

##### 4.1. Pilar Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)

Diharapkan terwujudnya kedaulatan ekonomi masyarakat perikanan yang mandiri dan sejahtera, di mana nelayan tidak lagi terjerat dalam ekonomi subsisten, melainkan menjadi subjek ekonomi yang memiliki daya tawar tinggi.

- **Indikator Kunci (IKK) Kesejahteraan:** Sasaran utama yang diukur adalah peningkatan **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**.<sup>3</sup> <sup>15</sup> Kondisi yang diharapkan adalah NTN sektor perikanan Kabupaten Kupang berada di atas angka 115, menunjukkan bahwa daya beli nelayan meningkat secara signifikan (Indeks Harga yang Diterima > Indeks Harga yang Dibayar).
- **Transformasi Ekonomi:** Sektor perikanan diharapkan bertransformasi dari ekonomi berbasis volume tangkapan mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah (*hilirisasi*). Ini berarti persentase volume produksi yang diproses (fillet, surimi, produk turunan rumput laut) melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) meningkat tajam, melampaui 40% dari total produksi, sehingga meningkatkan kontribusi PDRB riil



daerah.<sup>16</sup>

- **Efisiensi Operasional:** Fasilitas *bottleneck* kritis, seperti **perbengkelan di sentra pendaratan**, harus berfungsi penuh dan efisien, mengurangi Biaya Operasional (*Opex*) nelayan hingga 15% di tahun pertama, sehingga secara langsung mendukung kenaikan NTN.<sup>8</sup>

#### 4.2. Pilar SDM Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Misi 1)

Kondisi yang diharapkan adalah SDM perikanan yang unggul, adaptif terhadap teknologi dan manajemen risiko, serta memiliki jaminan dukungan insentif dari pemerintah daerah.

- **Kompetensi Bersertifikat:** Terwujudnya kemitraan strategis dengan Politeknik KP Kupang<sup>13</sup> yang menghasilkan tenaga teknis lokal bersertifikat. Lulusan ini harus mampu mengisi peran teknis kritis (misalnya, teknisi perbengkelan, operator *cold storage*, dan manajer *cold chain*) yang dibutuhkan oleh SKPT.<sup>13</sup>
- **Kemampuan Adaptif:** SDM perikanan diharapkan memiliki kemampuan manajerial untuk menghadapi volatilitas produksi yang **irregular**<sup>9</sup> melalui adopsi sistem peringatan dini dan literasi keuangan untuk memisahkan modal usaha dari konsumsi.
- **Dukungan Pemerataan SDM:** Terimplementasinya kebijakan insentif (perbedaan tunjangan struktural/fungsional)<sup>14</sup> untuk memastikan tenaga penyuluh dan teknisi yang kompeten bersedia ditempatkan di desa-desa pesisir terpencil, sesuai dengan visi pembangunan berbasis desa.<sup>14</sup>

#### 4.3. Pilar Penguatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Misi 4)

Diharapkan terwujudnya tata kelola sumber daya dan fiskal daerah yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *Good Governance* (efisiensi, transparansi, akuntabilitas).<sup>11</sup>

- **Transparansi Fiskal Penuh:** Implementasi sistem **E-Retribusi Terpadu** yang menghilangkan pungutan manual dan *undervaluation*. Kondisi yang diharapkan adalah Indeks Transparansi Tata Kelola Fiskal dari sektor perikanan mencapai minimal 90.
- **Peningkatan Kontribusi PAD:** Sektor perikanan diharapkan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kupang. Target IKK adalah peningkatan persentase kontribusi PAD minimal **15% per tahun** melalui penegakan kepatuhan Retribusi Jasa Usaha TPI (5% tarif)<sup>10</sup> yang dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan Bapenda.
- **Akuntabilitas Kinerja:** Dinas Perikanan dan Kelautan diharapkan mencapai nilai



penilaian mandiri **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang tinggi<sup>17</sup>, dengan Laporan Kinerja (LKjIP) yang fokus pada *outcome* strategis (NTN dan PAD)<sup>18</sup>, bukan hanya pada *output* belanja rutin.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan situasi, perumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. **Kedaulatan Ekonomi Rakyat:** Bagaimana strategi untuk mengintegrasikan pembangunan sektor perikanan berbasis *Blue Economy* agar secara terukur dan berkelanjutan dapat **meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN)**<sup>3</sup> dan daya saing melalui hilirisasi nilai tambah?
2. **SDM dan Inovasi Operasional:** Inovasi data dan terobosan infrastruktur apa yang harus diimplementasikan untuk mengelola risiko pola produksi yang **irregular dan tidak stasioner**<sup>9</sup>, sekaligus mengatasi *bottleneck* operasional kritis (termasuk **fasilitas perbengkelan yang non-fungsional**)<sup>8</sup> guna meningkatkan efisiensi dan kompetensi SDM perikanan?
3. **Penguatan Fiskal dan Tata Kelola:** Bagaimana mekanisme penguatan sistem penerimaan daerah (Retribusi Jasa Usaha TPI 5%)<sup>10</sup> dapat dioptimalkan secara transparan, akuntabel, dan efisien melalui **Digitalisasi Fiskal (E-Retribusi Terpadu)**<sup>19</sup>, sejalan dengan UU HKPD No. 1/2022?<sup>20</sup>

## C. Tujuan (Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang)

Tujuan Jangka Pendek (6-12 Bulan, Fokus Penataan Internal dan *Quick Wins*):

- Melakukan penataan tata kelola internal Dinas Perikanan dan Kelautan menuju *Good Governance* (misalnya, peningkatan nilai penilaian mandiri SAKIP).<sup>17</sup>
- Melakukan reviu dan harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha TPI agar sesuai dengan UU HKPD No. 1/2022.<sup>20</sup>
- Reaktivasi dan fungsionalisasi fasilitas perbengkelan di PPI/TPI percontohan.<sup>8</sup>
- Mengembangkan purwarupa sistem **E-Retribusi Perikanan** untuk diujicobakan pada satu lokasi TPI, guna mengatasi masalah transparansi dan kebocoran PAD.

Tujuan Jangka Menengah (1-3 Tahun, Fokus Pengembangan Program dan Integrasi):

- Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kupang hingga mencapai target >115, sebagai indikasi peningkatan daya beli dan kesejahteraan.<sup>3</sup>

- Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kupang dan meningkatkan persentase volume produksi yang diolah (*hilirisasi*) minimal 20%.
- Mewujudkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Komunitas di lokasi strategis yang dilengkapi dengan *integrated cold storage* dan unit pengolahan, dikelola oleh SDM bersertifikat.<sup>13</sup>

Tujuan Jangka Panjang (3-5 Tahun, Fokus Visi/Misi):

- Menjadikan sektor perikanan sebagai pilar utama Kedaulatan Ekonomi Rakyat Kabupaten Kupang.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di sektor perikanan melalui sistem fiskal yang sepenuhnya transparan dan akuntabel.<sup>11</sup>
- Mencapai target perluasan kawasan konservasi laut di wilayah kelola daerah, sejalan dengan peta jalan *Blue Economy* KKP.<sup>5</sup>

## D. Kegunaan

1. **Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang:** Sebagai dokumen acuan dan peta jalan strategis (*Blue Economy Blueprint*) bagi Dinas Perikanan dalam menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang ke dalam program kerja yang terukur, termasuk strategi penguatan PAD dari sektor perikanan.
2. **Bagi Masyarakat Perikanan:** Sebagai jaminan komitmen kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan (diukur melalui NTN)<sup>3</sup>, peningkatan akses pasar (melalui SKPT)<sup>16</sup>, dan perlindungan sumber daya kelautan (melalui prinsip *Blue Economy*).<sup>5</sup>
3. **Bagi Penulis (Calon Pejabat):** Sebagai instrumen pertanggungjawaban dan komitmen kinerja yang akan diimplementasikan setelah menjabat, dengan fokus pada *outcome* yang terukur.

## E. Kerangka Konseptual/Konseptual

Makalah ini disusun berdasarkan kerangka berpikir logis yang menghubungkan antara potensi daerah, isu strategis, dan pencapaian Visi/Misi.

*Tabel 1.1 Kerangka Konseptual*

Komponen Konseptual	Deskripsi
Visi & Misi	Menetapkan tujuan pembangunan perikanan, berfokus pada Misi 1 (SDM), Misi 2

	(Ekonomi), dan Misi 4 (Good Governance). <sup>14</sup>
<b>Isu Strategis &amp; Gap</b>	Kesenjangan antara Kondisi Saat Ini (Irregularitas Produksi, <i>Bottleneck</i> Perbengkakan, Fiskal Manual) dan Kondisi yang Diharapkan. <sup>9</sup>
<b>Konsep Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK)</b>	Landasan filosofis untuk pembangunan perikanan yang berkelanjutan, menciptakan nilai tambah (hilirisasi) dan memprioritaskan komunitas nelayan skala kecil. <sup>5</sup>
<b>Analisis Volatilitas Data</b>	Penggunaan model peramalan (Polinomial Orde 4/5) untuk mengelola risiko stok ikan yang <b>irregular dan tidak stasioner</b> . <sup>9</sup>
<b>Inovasi Digitalisasi Fiskal</b>	Penerapan <b>E-Retribusi TPI</b> sebagai solusi <i>Good Governance</i> untuk transparansi dan akuntabilitas pungutan Retribusi Jasa Usaha (5% tarif). <sup>10</sup>
<b>Output &amp; Outcome</b>	Indikator keberhasilan terukur yang menjadi sasaran program, berfokus pada peningkatan NTN dan PAD. <sup>1</sup>

## **BAB II. LANDASAN PENULISAN**

### **A. Landasan Yuridis / Konstitusional**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 – 2024;
15. Peraturan Bupati Kupang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang;

## **B. Landasan Pustaka, Teori, dan Kerangka Konseptual**

### **B.1. Landasan Teori Pembangunan Kelautan Berkelanjutan**

#### **B.1.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sektor Maritim dan Pesisir**

Pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan merupakan agenda global dan nasional yang fundamental, terutama bagi negara kepulauan. Di Indonesia, mandat ini bahkan

tertuang dalam konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa kekayaan alam, termasuk sumber daya pesisir dan lautan, harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk mencapai manfaat optimal bagi rakyat banyak, menuntut terwujudnya keadilan, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kerangka pembangunan berkelanjutan di sektor maritim wajib mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara eksplisit.

### **B.1.2. Kerangka Triple Bottom Line (TBL) dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

Konsep Triple Bottom Line (TBL), yang dipromosikan oleh John Elkington pada tahun 1994, berfungsi sebagai lensa holistik untuk mengevaluasi keberlanjutan. TBL mensyaratkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur berdasarkan Profit (Ekonomi), tetapi juga Planet (Lingkungan) dan People (Sosial).<sup>2</sup> Dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, ideal TBL adalah untuk memaksimalkan tujuan konservasi dan ekuitas dalam hasil sosial, sambil secara keseluruhan meminimalkan biaya.<sup>4</sup>

#### **B.1.2.1. Dimensi Planet: Konservasi, Keanekaragaman Hayati, dan Batasan Ekologis**

Dimensi Planet berfokus pada perlindungan ekosistem dan modal alam. Dalam perikanan, hal ini meliputi pengelolaan stok ikan yang lestari dan mitigasi praktik yang merusak. Contoh nyata dari ancaman terhadap dimensi Planet adalah penggunaan metode penangkapan ikan tradisional yang tidak efisien, seperti jaring berukuran terlalu kecil, yang menyebabkan tertangkapnya ikan-ikan muda yang belum mencapai usia reproduksi, sehingga mengancam keberlanjutan stok ikan secara keseluruhan.<sup>5</sup> Komitmen lingkungan juga meluas hingga pengelolaan limbah dari aktivitas industri, termasuk pengelolaan limbah B3 untuk mencegah pencemaran.<sup>3</sup>

#### **B.1.2.2. Dimensi Profit: Efisiensi Ekonomi, Produksi, dan Daya Saing**

Dimensi Profit menekankan pada profitabilitas yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, termasuk nelayan dan perusahaan perikanan. Pengelola perikanan secara tradisional berjuang untuk mencapai keseimbangan yang sulit antara Profit bagi nelayan dan konservasi bagi Planet.<sup>2</sup> Optimalisasi profit yang berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, pendorongan ekspor, dan peningkatan konsumsi perikanan

tangkap.<sup>6</sup>

### **B.1.2.3. Dimensi People: Ekuitas Sosial dan Kesejahteraan Komunitas Pesisir**

Dimensi People (Ekuitas Sosial) adalah pilar yang sangat penting karena melibatkan distribusi manfaat dan biaya yang adil. Keberhasilan upaya konservasi sangat bergantung pada bagaimana manfaat atau biaya tersebut dibagikan secara adil di seluruh masyarakat.<sup>4</sup> Pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat, yang sejalan dengan pengembangan perikanan rakyat (Artisanal Fishery), merupakan strategi kunci untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat pesisir yang seringkali rentan.<sup>1</sup>

### **B.1.3. Analisis *Trade-Off* TBL: Pertukaran antara Konservasi dan Ekuitas Sosial**

Meskipun TBL adalah cita-cita yang harus dicapai, implementasinya seringkali dihadapkan pada *trade-off* implisit yang kompleks.<sup>2</sup> Analisis mendalam, termasuk studi kasus di Raja Ampat (Indonesia) dan Coral Triangle, menunjukkan bahwa ekuitas sosial cenderung memiliki hubungan pertukaran non-linear dengan potensi untuk mencapai tujuan konservasi.<sup>4</sup>

Hubungan ini mengindikasikan bahwa dimungkinkan untuk mencapai tingkat hasil konservasi yang serupa dengan memberikan tingkat ekuitas yang lebih tinggi, tetapi hubungan ini berlaku hingga titik tertentu. Tipologi pertukaran bervariasi—dapat berupa pertukaran langsung (linear), non-linear, atau bahkan situasi tanpa pertukaran—tergantung pada bagaimana ekuitas sosial diukur dan didefinisikan.<sup>4</sup>

Pemahaman ini menyoroti perlunya kerangka teori formal yang eksplisit untuk mengintegrasikan ekuitas ke dalam perencanaan konservasi.<sup>4</sup> Ekuitas sosial tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir dari TBL, tetapi juga sebagai **variabel independen yang memengaruhi probabilitas keberhasilan konservasi itu sendiri**. Apabila komunitas lokal merasa bahwa pengelolaan sumber daya tidak adil, mereka mungkin kurang termotivasi untuk mendukung atau mematuhi upaya konservasi. Oleh karena itu, memastikan distribusi manfaat yang adil merupakan prasyarat untuk efektivitas konservasi, yang merupakan sebuah penentu penting dalam kemampuan aktual untuk mencapai tujuan konservasi.

## **B.2. Paradigma Ekonomi Inovatif: Blue Economy dan Ekonomi Kerakyatan**

### **B.2.1. Ekonomi Biru (*Blue Economy*) sebagai Transformasi TBL**

Blue Economy (BE), yang diprakarsai oleh Gunter Pauli pada tahun 2010, menawarkan

pendekatan inovatif untuk mengatasi kelemahan TBL dengan berfokus pada efisiensi model alam.<sup>5</sup> BE dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan efisien, tanpa merusak lingkungan, sekaligus berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan lokal.<sup>5</sup>

#### **B.2.1.1. Prinsip Fundamental Blue Economy**

BE merupakan pergeseran pola pikir yang didasarkan pada empat pilar yang beroperasi sebagai strategi untuk mengatasi tantangan Profit dan Planet secara terintegrasi<sup>8</sup>:

1. **Meniru Alam (*Imitating Nature*):** Pilar kunci yang mengedepankan konsep *zero waste*. Dalam ekosistem alami, tidak ada limbah; sisa atau produk sampingan dari satu proses menjadi nutrisi atau sumber daya untuk proses berikutnya.<sup>8</sup>
2. **Kemandirian (*Self-Sufficiency*):** Strategi untuk mengganti input eksternal yang mahal dan tidak berkelanjutan dengan alternatif lokal. Ini sangat penting untuk mengurangi biaya operasional dan ketergantungan nelayan pada sumber daya luar.<sup>8</sup>
3. **Solusi yang Terukur dan Dapat Direplikasi:** Inovasi yang dikembangkan harus mudah diterapkan dan diperluas, mulai dari komunitas pedesaan kecil hingga operasi skala kota besar.<sup>8</sup>
4. **Dampak Ekonomi dan Sosial:** Pilar ini secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, yang berpotensi menghasilkan 100 juta pekerjaan dari 100 inovasi dalam waktu 10 tahun, tanpa merusak lingkungan.<sup>8</sup>

#### **B.2.1.2. Tujuan Operasional Blue Economy**

Secara operasional, BE memiliki tiga tujuan terpadu: **mengurangi biaya operasional, menghasilkan lapangan kerja lokal, dan meregenerasi modal alam.**<sup>8</sup> Meskipun memiliki potensi besar, penerapan BE di Indonesia menghadapi tantangan. Contohnya di Kepulauan Sangkarrang, Makassar, kendala utama adalah kurangnya teknologi dan pengetahuan modern, yang menyebabkan nelayan masih menggunakan metode penangkapan tradisional yang tidak efisien.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan BE memerlukan **kapasitas kelembagaan yang kuat** untuk mentransfer dan mereplikasi solusi inovatif sesuai dengan pilar ketiga BE.

#### **B.2.2. Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Konteks Maritim Indonesia**

Ekonomi Kerakyatan (EK) adalah sistem yang berlandaskan pada kemandirian dan



pemanfaatan sumber daya alam lokal, dengan menempatkan masyarakat (rakyat) sebagai pelaku utama.<sup>10</sup> Sektor perikanan merupakan subsektor vital dari EK, didorong oleh potensi sumber daya laut Indonesia yang luas.<sup>10</sup>

### **B.2.3. Sinergi antara Blue Economy dan Peningkatan Ekonomi Lokal**

Blue Economy berperan sebagai **pendekatan inovatif strategis** untuk memperkuat fondasi Ekonomi Kerakyatan dalam konteks maritim. Prinsip *self-sufficiency* dan penciptaan lapangan kerja BE secara langsung mendukung karakteristik kemandirian ekonomi lokal.<sup>8</sup>

Di luar manfaat lingkungan dan diversifikasi, fokus BE pada pengurangan biaya operasional melalui prinsip *self-sufficiency* dan peningkatan nilai tambah melalui *zero waste* sangat signifikan. Strategi ini secara langsung mengurangi sensitivitas pendapatan nelayan terhadap volatilitas biaya input (misalnya subsidi BBM) dan harga output yang tidak stabil. Oleh karena itu, penerapan inovasi BE adalah **strategi mitigasi risiko struktural** yang memperkuat determinan utama kesejahteraan nelayan. Melalui BE, nelayan tradisional didorong untuk bertransisi dari penangkapan semata menuju pengelolaan rantai nilai terintegrasi, seperti pengembangan marikultur atau pelayanan jasa di wilayah pesisir.<sup>1</sup>

## **B.3. Kerangka Kuantifikasi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan**

### **B.3.1. Pengukuran Kesejahteraan: Dari Pendapatan hingga Daya Beli**

Untuk mengukur keberhasilan dimensi People (sosial) TBL, diperlukan indikator kuantitatif yang sensitif terhadap kondisi ekonomi riil komunitas pesisir. Meskipun pendapatan rumah tangga nelayan (RTN) dapat dihitung dari usaha perikanan tangkap dan non-perikanan tangkap<sup>11</sup>, metrik ini harus dikoreksi untuk mencerminkan daya beli bersih.

### **B.3.2. Nilai Tukar Nelayan (NTN): Definisi, Reformulasi, dan Justifikasi sebagai Indikator**

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan nelayan, didasarkan pada perbandingan indeks harga yang diterima (output) dengan indeks harga yang dibayar (input produksi dan konsumsi).<sup>6</sup> NTN dijustifikasi karena mencerminkan **daya beli riil nelayan**.<sup>6</sup> Namun, terdapat kebutuhan kritis untuk **mereformulasi dan mengoreksi** NTN yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memasukkan data **pertumbuhan produksi dan tenaga kerja perikanan tangkap**,

agar indikator ini menjadi tolok ukur kesejahteraan yang lebih komprehensif.<sup>6</sup>

### **B.3.3. Determinasi NTN dan Peran Kebijakan Publik**

Analisis spasial menggunakan Geographically Weighted Panel Regression (GWPR) telah mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan dan spasial memengaruhi NTN di tingkat provinsi.<sup>6</sup> Temuan ini menjadi dasar perumusan kebijakan intervensi yang terarah.

#### **B.3.3.1. Variabel Produksi dan Tenaga Kerja**

Nilai **produksi perikanan tangkap** dan **tenaga kerja perikanan tangkap** merupakan determinan NTN yang signifikan di semua provinsi. Oleh karena itu, program pemerintah harus mendorong peningkatan produksi, ekspor, dan konsumsi perikanan.<sup>6</sup>

#### **B.3.3.2. Peran Infrastruktur Logistik dan Fiskal**

Bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki dampak langsung terhadap NTN melalui kontrol terhadap biaya input dan stabilitas harga output<sup>6</sup>:

1. **Pengendalian Biaya Input:** Kebijakan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil harus dipertahankan untuk menekan biaya operasional. Selain itu, **Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID)** harus memaksimalkan perannya dalam mengendalikan inflasi barang konsumsi di perdesaan untuk menjaga daya beli nelayan.<sup>6</sup>
2. **Logistik dan Stabilitas Harga Output:** Menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan adalah esensial. Hal ini dicapai melalui penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan percepatan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) produk perikanan.<sup>6</sup> Peningkatan ini sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur *cold storage* dan jaminan ketersediaan listrik.<sup>6</sup>

### **B.3.4. Analisis Spasial Kesejahteraan Nelayan**

Temuan adanya dependensi spasial dalam pola NTN menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan di suatu area dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya, seringkali membentuk pola mengelompok.<sup>6</sup> Provinsi yang berada di Kuadran III (NTN rendah) memerlukan perhatian kebijakan yang sangat terfokus.<sup>6</sup>

NTN berfungsi sebagai indikator yang menghubungkan dimensi People TBL dengan intervensi kelembagaan. Peningkatan NTN melalui kebijakan infrastruktur logistik menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan sangat terkait dengan kinerja kelembagaan dan kemampuan pemerintah

daerah untuk mendanai dan melaksanakan proyek infrastruktur ini, menjadikannya indikator kinerja Good Governance secara tidak langsung.

#### **B.4. Fondasi Kelembagaan: Good Governance dan Digitalisasi Fiskal Daerah**

Pencapaian tujuan keberlanjutan (TBL/BE) dan peningkatan kesejahteraan (NTN) menuntut adanya kerangka kelembagaan yang efisien dan akuntabel. Good Governance (GG) yang diimplementasikan melalui teknologi digital menyediakan fondasi yang diperlukan.

##### **B.4.1. Definisi dan Prinsip Good Governance (GG)**

Good Governance adalah kerangka administrasi publik yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas.<sup>12</sup> Transparansi adalah prinsip yang didasarkan pada kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi<sup>12</sup>, berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat dan sebagai upaya kunci untuk mengurangi praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).<sup>12</sup>

##### **B.4.2. Reformasi Fiskal Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Transformasi digital adalah suatu keharusan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.<sup>13</sup> Dalam bidang fiskal, tujuan utamanya adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi sistem. Karena pajak dan retribusi merupakan sumber utama PAD, kegagalan dalam mengelola sistem secara modern akan mengakibatkan kebocoran pajak dan rendahnya kepatuhan, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas fiskal daerah untuk mendanai program pembangunan.<sup>13</sup>

##### **B.4.3. Implementasi *E-Government* untuk Pelayanan Publik dan Good Governance**

Penerapan *E-Government* memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi administrasi.<sup>14</sup> Filosofi New Public Service (NPS) menekankan bahwa aparatur publik memiliki tugas yang lebih tinggi daripada sekadar melayani pelanggan; mereka bertugas **menyampaikan demokrasi** (*deliver democracy*), yang memerlukan integritas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

##### **B.4.3.1. Konsep E-Retribusi dan Peran dalam Mitigasi Kebocoran Fiskal**

E-Retribusi, sebagai bagian dari E-Government, merupakan mekanisme digitalisasi pungutan daerah. Tujuannya adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.<sup>13</sup>

Transformasi ini, seperti yang dianalogikan melalui sistem pengelolaan pajak digital (PANDAWA) <sup>13</sup>, memungkinkan pencatatan transaksi retribusi (misalnya biaya pendaratan ikan) secara *real-time*. Sistem E-Retribusi Perikanan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi KKN dan menghasilkan data akurat, sehingga secara signifikan **mengoptimalkan PAD** dan memperkuat transparansi fiskal.<sup>12</sup>

#### **B.4.4. Peran Kapasitas Kelembagaan dan Standard Operational Procedure (SOP) Digital**

Digitalisasi membutuhkan penyesuaian kelembagaan untuk menjamin pelayanan yang cepat, nyaman, dan murah.<sup>15</sup> Kapasitas kelembagaan sangat ditentukan oleh kejelasan Standard Operational Procedure (SOP). SOP, baik yang bersifat makro (mengintegrasikan beberapa kegiatan) maupun teknis, harus menjadi landasan logis perancangan sistem E-Retribusi.<sup>16</sup> SOP yang terstruktur menjamin konsistensi pelayanan dan mendukung akuntabilitas dalam sistem digital.

Selain itu, personel pelaksana harus memiliki **E-Literacy**, yaitu kecakapan yang melampaui kemampuan teknis, meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif dalam konteks digital.<sup>15</sup> Secara kausal, Good Governance berbasis digital ini bertindak sebagai **prasyarat fiskal**. Optimalisasi PAD yang dihasilkan oleh E-Retribusi adalah sumber daya yang memungkinkan pemerintah mendanai infrastruktur krusial (seperti *cold storage* dan SLIN) yang merupakan determinan langsung bagi peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

## BAB III. PEMBAHASAN

### A. Isu Strategis terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang

#### A.1. Analisis Mendalam terhadap Isu Keterbatasan Infrastruktur dan Efisiensi Hulu

##### 1. Inefisiensi Kritis: Non-Fungsionalitas Fasilitas Perbengkelan

PPI Oeba, meskipun berada di Kota Kupang, merupakan simpul logistik yang krusial bagi nelayan Kabupaten Kupang. Analisis infrastruktur menunjukkan adanya **fasilitas fungsional berupa perbengkelan yang belum berjalan atau tidak digunakan**.<sup>8</sup> Ini adalah *bottleneck* operasional yang paling mudah diidentifikasi dan diatasi sebagai *quick win*.

Dampak Kritis:

- **Peningkatan *Opex*:** Kerusakan kapal memaksa nelayan menggunakan jasa perbengkelan di luar area PPI/SKPT, yang umumnya lebih mahal dan jauh.
- **Penurunan Produktivitas:** Waktu yang terbuang untuk perbaikan di luar area pendaratan mengurangi waktu efektif melaut (*non-productive time*).
- **Implikasi NTN:** Peningkatan *Opex* (harga yang dibayar nelayan) tanpa kenaikan harga jual (harga yang diterima) akan menyebabkan **penurunan NTN**<sup>3</sup>, yang berarti daya beli nelayan melemah.

**Solusi Inovatif (Akses dan Aplikasi):** Reaktivasi fasilitas perbengkelan harus didukung dengan **Aplikasi Manajemen Aset Komunitas** dan **Akses Pembiayaan Mikro** untuk pengadaan suku cadang, serta harus dikelola oleh SDM lokal bersertifikat vokasi dari Politeknik KP Kupang.<sup>13</sup>

##### 2. Kebutuhan Hilirisasi Melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Untuk mengatasi *post-harvest loss* dan meningkatkan nilai tambah PDRB 44%<sup>1</sup>, fokus harus beralih ke hilirisasi melalui SKPT. Model SKPT KKP mengintegrasikan fasilitas dari hulu (pendaratan) hingga hilir (pengolahan, *cold storage*, mesin es *flake*).<sup>16</sup> Model pengelolaan SKPT harus berfokus pada **Proporsi Nilai dan Arus Pendapatan**<sup>23</sup>, memastikan bahwa

investasi menciptakan manfaat ekonomi yang terukur dan menghasilkan Retribusi Jasa Usaha baru.

## A.2. Analisis Risiko Sumber Daya dan Inovasi Data

### 1. Karakteristik Irregularitas Produksi Komoditas Unggulan

Komoditas penting NTT seperti Tuna, Cakalang, dan Kerapu yang didaratkan di sekitar Kupang<sup>9</sup> memiliki pola produksi yang **irregular dan tidak stasioner**.<sup>9</sup>

- **Implikasi Risiko:** Ketidakpastian pasokan ini membuat investasi pada *cold storage* dan unit pengolahan menjadi berisiko tinggi karena utilitas fasilitas tidak terjamin. Pola ini juga menyulitkan penentuan kuota tangkap yang berkelanjutan.

Solusi Inovatif (Aplikasi dan Akselerasi):

Untuk menghadapi ketidakpastian ini, diperlukan Inovasi Aplikasi Data Peramalan Canggih. Dinas Perikanan harus mengadopsi hasil riset yang menunjukkan bahwa peramalan terbaik untuk Tuna adalah model Polinomial Orde 4 dan untuk Cakalang adalah Polinomial Orde 5.9 Data peramalan ini harus digunakan untuk:

- Menginformasikan kebijakan adaptif mengenai musim tangkap optimal.
- Mengkalibrasi perencanaan logistik dan kapasitas *cold storage* di SKPT.
- Memberikan *Early Warning System* (EWS) kepada nelayan untuk manajemen risiko.

## A.3. Analisis Kesenjangan Tata Kelola Fiskal dan Digitalisasi PAD

### 1. Sub-Optimalisasi PAD dan Kebocoran Retribusi TPI

Meskipun Perda 6/2012 menetapkan tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebesar **5% dari hasil lelang**<sup>10</sup>, realisasi PAD sektor perikanan masih sub-optimal. Masalah utama adalah **rendahnya tingkat kepatuhan** dan **transaksi *by-pass*** (di luar TPI) yang menyebabkan *undervaluation* dan kebocoran pendapatan.

Dampak Kesenjangan Tata Kelola:

- Menghambat Misi 4 (*Good Governance*)<sup>14</sup> karena proses pungutan tidak transparan dan akuntabel.<sup>11</sup>
- Melemahkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai belanja pelayanan publik.

Solusi Inovatif (Digitalisasi Fiskal):

Inovasi harus berpusat pada Aplikasi E-Retribusi Terpadu. Sistem ini harus menggunakan

teknologi digital (QR code/Aplikasi Mobile) 19 untuk mencatat transaksi secara real-time di seluruh TPI/sentra pendaratan, memastikan tarif 5% ditegakkan secara otomatis 10, dan datanya terintegrasi langsung dengan Bapenda. Implementasi E-Retribusi adalah prasyarat mutlak untuk mencapai transparansi dan meningkatkan kepatuhan pembayaran.

## B. Melakukan Analisis Terhadap Isi Strategis Dengan Output Dan Outcome Terukur Dan Berdampak Serta Memiliki Inovasi Yang Mudah Di Implementasikan.

Rencana strategis Dinas Perikanan akan berlandaskan pada 4 (Empat) Program Unggulan Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK).

### B.1. Program Kedaulatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan (Mendukung Misi 2)

Sasaran: Penguatan 100% wilayah tangkap yang terkelola secara lestari dan peningkatan kontribusi PDRB perikanan.

Kerangka Inovasi: Aplikasi dan Akselerasi (Manajemen Data)

*Tabel 4 1 Program Kedaulatan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan (Mendukung Misi 2)*

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Output	Justifikasi Strategis
<b>1. Penerapan Sistem Manajemen Perikanan Adaptif</b>	Peningkatan Akurasi Peramalan Produksi (Orde 4/5) <sup>9</sup>	Mengurangi risiko perencanaan logistik akibat pola produksi yang irregular dan tidak stasioner. <sup>9</sup>
<b>2. Perluasan Kawasan Konservasi Lokal</b>	Persentase area konservasi yang ditetapkan.	Mendukung pilar ekologi <i>Blue Economy</i> (target KKP 30% konservasi) <sup>5</sup> dan menjamin <i>spawning ground</i> .
<b>3. Pengembangan Sistem Pemantauan Perikanan Berbasis POKMASWAS</b>	Jumlah POKMASWAS yang terintegrasi dalam sistem <i>reporting</i> digital.	Melibatkan komunitas (BEBK) dalam pengawasan stok ikan dan penegakan hukum lokal.

### B.2. Program Industrialisasi dan Logistik Perikanan Berbasis Blue Economy (Mendukung Misi 2)



Sasaran: Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan volume hilirisasi.

Kerangka Inovasi: Akses dan Akselerasi (Infrastruktur dan Nilai Tambah)

*Tabel 4 2 Program Industrialisasi dan Logistik Perikanan Berbasis Blue Economy (Mendukung Misi 2)*

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Output	Justifikasi Strategis
<b>1. Reaktivasi dan Kemitraan Fasilitas Perbengkelan</b>	Persentase Pemanfaatan Fasilitas Perbengkelan PPI/TPI. <sup>8</sup>	<i>Quick win</i> yang mengatasi <i>bottleneck</i> operasional kritis, <b>menurunkan <i>Opex</i> nelayan</b> , dan meningkatkan NTN. <sup>3</sup>
<b>2. Pembangunan SKPT Komunitas Terintegrasi</b>	Kapasitas <i>Integrated Cold Storage</i> dan Unit Pengolahan Terbangun.	Menggeser ekonomi dari <i>raw commodity</i> ke hilirisasi, meningkatkan nilai jual dan menyerap produk saat panen melimpah (mengatasi irregularitas pasokan). <sup>16</sup>
<b>3. Pembentukan <i>Kupang Fisheries Brand</i> dan Sertifikasi</b>	Jumlah produk unggulan (Tuna, Cakalang, Rumput Laut) yang bersertifikasi PIRT/Halal/HACCP.	Membuka akses ke pasar regional dan nasional dengan harga premium.

### B.3. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan (Mendukung Misi 1)

Sasaran: Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM perikanan.

Kerangka Inovasi: Aplikasi (Vokasi dan Insentif)

*Tabel 4 3 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan (Mendukung Misi 1)*

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Output	Justifikasi Strategis
<b>1. Kemitraan Vokasi dengan Politeknik KP Kupang</b>	Jumlah SDM yang tersertifikasi vokasi <i>cold chain</i> dan teknisi	Menjamin ketersediaan tenaga kerja lokal yang kompeten untuk

	perbengkelan. <sup>8</sup>	mengoperasikan fasilitas SKPT dan perbengkelan yang baru direaktivasi.
<b>2. Pelatihan Manajemen Adaptif dan Literasi Keuangan</b>	Persentase nelayan/pembudidaya yang mengadopsi praktik <i>cold chain management</i> dan pemisahan modal usaha.	Mengurangi <i>post-harvest loss</i> dan memperkuat manajemen keuangan nelayan (kunci peningkatan NTN). <sup>3</sup>
<b>3. Pemberlakuan Kebijakan Insentif SDM Terpencil</b>	Jumlah penyuluh perikanan/teknisi yang ditempatkan di kawasan pesisir terpencil. <sup>14</sup>	Mendukung Visi Pemda membangun dari desa <sup>14</sup> dan memastikan program BEBK di tingkat komunitas memiliki dukungan teknis yang memadai.

#### B.4. Program Penguatan Fiskal Daerah dan Tata Kelola (Mendukung Misi 4)

Sasaran: Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pungutan daerah dari sektor perikanan.

Kerangka Inovasi: Digitalisasi Fiskal (D) dan Good Governance

Tabel 4 4 Program Penguatan Fiskal Daerah dan Tata Kelola (Mendukung Misi 4)

Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Output	Justifikasi Strategis
<b>1. Implementasi Sistem E-Retribusi Terpadu</b>	Peningkatan tingkat kepatuhan Retribusi TPI (5%) <sup>10</sup> dan Nilai Indeks Transparansi Tata Kelola Fiskal. <sup>11</sup>	<b>Kunci <i>Good Governance</i>:</b> Menghilangkan kebocoran, <i>undervaluation</i> , dan memastikan akuntabilitas PAD.
<b>2. Review dan Harmonisasi Perda Retribusi Jasa Usaha</b>	Perda Retribusi Jasa Usaha yang disinkronkan penuh dengan UU HKPD No.	Memperkuat legitimasi hukum pungutan 5% <sup>10</sup> dan memperluas objek pungutan

	1/2022. <sup>20</sup>	jasa baru di SKPT (sewa <i>cold storage</i> , perbengkelan). <sup>20</sup>
<b>3. Audit Kinerja Fiskal</b> <b>Berbasis <i>Outcome</i></b>	Peningkatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DKP <sup>17</sup> dan fokus LKjIP pada <i>outcome</i> (PAD dan NTN). <sup>14</sup>	Memastikan efektivitas belanja publik dan akuntabilitas kinerja terhadap sasaran strategis.

## C. Rencana Strategis Pencapaian Target Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang.

### C.1. Peta Jalan Implementasi Program Blue Economy Berbasis Komunitas (2025–2030)

Peta jalan berikut membagi implementasi program BEBK menjadi tiga fase, memastikan dasar regulasi dan kelembagaan diperkuat sebelum skala program diperluas.

*Tabel 5 1 Peta Jalan Implementasi Program Blue Economy Berbasis Komunitas (2025–2030)*

Fase	Tahun (Asumsi 2025-2030)	Fokus Program	Sasaran Kunci (Pilar Utama)	Output Kunci (IKK)
<b>I. Fondasi &amp; Regulasi</b>	2025-2026	Audit Infrastruktur Kritis <sup>8</sup> ; Reviu Perda Retribusi Jasa Usaha <sup>15</sup> ; PKS Vokasi <sup>13</sup> ; Studi Kelayakan SKPT; Purwarupa E-Retribusi.	Penguatan Fiskal, SDM Berdaya Saing	Perda Retribusi Jasa Usaha yang Diperbarui; Modul Vokasi Teknisi Kelautan; Rencana Induk SKPT.
<b>II. Pilot Project &amp; Integrasi</b>	2027-2028	<b>Reaktivasi Perbengkelan</b> <sup>8</sup> ; Pilot Implementasi E-Retribusi TPI <sup>19</sup> ; Peluncuran SKPT Tahap Awal; Implementasi Model	Kedaulatan Ekonomi Rakyat, Penguatan Fiskal	Tingkat Pemanfaatan Perbengkelan (>70%); Prosentase Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Usaha. <sup>1</sup>

		Peramalan. <sup>9</sup>		
<b>III. Skalabilitas &amp; Sustansi</b>	2029-2030	Skalabilitas Model SKPT; Sertifikasi SDM Massal; <b>Monitoring Kinerja NTN</b> <sup>3</sup> ; Perluasan Kawasan Konservasi. <sup>5</sup>	Kedaulatan Ekonomi Rakyat, SDM Berdaya Saing	Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) $\geq 115\%$ ; Tercapainya target perluasan kawasan konservasi. <sup>5</sup>

## C.2. Kerangka Anggaran dan Sumber Pendanaan

Optimalisasi anggaran harus mengedepankan investasi produktif dan tidak hanya belanja rutin. Fokus anggaran adalah pada:

1. **Investasi *Quick Win*:** Dana untuk reaktivasi fasilitas perbengkelan <sup>8</sup> yang memberikan dampak langsung pada pengurangan *Opex* nelayan.
2. **Infrastruktur Hilirisasi:** Biaya pembangunan *integrated cold storage* dan unit pengolahan SKPT.<sup>16</sup>
3. **Investasi SDM:** Biaya pelatihan dan sertifikasi vokasi <sup>13</sup> dan alokasi insentif penempatan SDM terpencil.<sup>14</sup>
4. **Investasi Tata Kelola:** Anggaran pengembangan dan implementasi sistem **E-Retribusi TPI** <sup>19</sup> serta *hardware* pendukung (tablet, *printer* mobile, konektivitas).

Sumber pendanaan harus didiversifikasi:

- APBD Murni: Untuk biaya operasional *quick win* dan insentif.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP: Untuk pembangunan fasilitas fisik SKPT.
- Kemitraan Swasta/BUMN: Skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Public-Private Partnership* (PPP) untuk pengelolaan fasilitas komersial (perbengkelan, *cold storage*).

## C.3. Penguatan Tata Kelola (*Good Governance*) dan Akuntabilitas

Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Misi 4) harus berorientasi pada hasil

(akuntabilitas outcome).<sup>10</sup>

1. **Transparansi Fiskal:** Implementasi E-Retribusi adalah tulang punggung transparansi, yang sejalan dengan prinsip GG.<sup>11</sup> Laporan realisasi PAD dari sektor perikanan harus dipublikasikan secara rutin dan *real-time*.
2. **Akuntabilitas Kinerja (SAKIP/LKjIP):** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
<sup>10</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan harus bertransformasi. Indikator kinerja tidak boleh lagi didominasi oleh *output* (misalnya, jumlah bibit yang disalurkan), melainkan oleh *outcome* strategis seperti NTN <sup>3</sup> dan **persentase peningkatan PAD** dari Retribusi Jasa Usaha.<sup>1</sup> Peningkatan ini akan berdampak positif pada **Nilai Penilaian Mandiri SAKIP** unit kerja.<sup>17</sup>

#### C.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Jangka Menengah

Tabel 5 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Jangka Menengah

Pilar Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan Ukur	Baseline (Asumsi)	Target Jangka Menengah (2030)
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sektor Perikanan <sup>3</sup>	Nilai Indeks	Data Historis NTT <sup>3</sup>	≥ 115 (Peningkatan Daya Beli Nelayan)
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Persentase Volume Produksi yang Dihilirisasi (Melalui SKPT)	%	10% (Asumsi Rendah)	40%
<b>Kedaulatan Ekonomi Rakyat (Misi 2)</b>	Persentase Penurunan <i>Opex</i> Nelayan (dari Reaktivasi Perbengkelan) <sup>8</sup>	%	0%	15%
<b>SDM Berdaya Saing (Misi 1)</b>	Jumlah SDM Kelautan yang	Orang	Data Politeknik KP Kupang	Peningkatan 100% dari

	Tersertifikasi Vokasi <sup>13</sup>			Baseline
<b>Penguatan Fiskal Daerah (Misi 4)</b>	Prosentase Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Usaha Kelautan <sup>1</sup>	%	Data Realisasi DKP Kupang	Peningkatan Minimal 15%\$per tahun
<b>Penguatan Fiskal Daerah (Misi 4)</b>	Nilai Indeks Transparansi E- Retribusi TPI	Nilai Indeks 0- 100	Data Eksisting TPI	90

## BAB VI. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Optimalisasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kupang dapat dicapai secara holistik dan terstruktur melalui adopsi **Program Blue Economy Berbasis Komunitas (BEBK)**. Pendekatan ini secara strategis mengatasi empat isu krusial: manajemen risiko produksi yang **irregular**<sup>9</sup>, eliminasi inefisiensi operasional hulu melalui reaktivasi **perbengkelan**<sup>8</sup>, penguatan SDM melalui **kemitraan vokasi**<sup>13</sup>, dan reformasi tata kelola fiskal melalui **E-Retribusi Terpadu**.

Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kontribusi PDRB 44%<sup>1</sup> melalui hilirisasi nilai tambah, tetapi yang terpenting adalah mencapai *outcome* tertinggi yaitu **Kedaulatan Ekonomi Rakyat** (Misi 2) yang dicerminkan dari peningkatan signifikan pada **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**.<sup>3</sup> Pada saat yang sama, reformasi digital pada Retribusi Jasa Usaha TPI (5% tarif)<sup>10</sup> akan menjamin **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel** (Misi 4)<sup>11</sup>, sejalan dengan kerangka UU HKPD.<sup>20</sup>

### B. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Mendesak

Berdasarkan analisis strategis, tiga rekomendasi kebijakan dan langkah operasional mendesak yang harus segera dilaksanakan adalah:

1. **Reformasi Regulasi dan Digitalisasi Fiskal:** Segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mewajibkan penggunaan sistem **E-Retribusi Terpadu** sebagai satu-satunya mekanisme pembayaran Retribusi Jasa Usaha (5%) di TPI dan SKPT. Tindakan ini harus didahului dengan reviu dan harmonisasi Perda Nomor 6 Tahun 2012<sup>15</sup> untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap UU HKPD No. 1/2022<sup>20</sup> dan melegalkan pungutan jasa baru (sewa *cold storage*, perbengkelan).
2. **Investasi Infrastruktur Kritis dan Vokasi Terintegrasi:** Mengalokasikan anggaran prioritas untuk reaktivasi kritis fasilitas **perbengkelan** di PPI/TPI<sup>8</sup> sebagai *quick win* yang memberikan dampak langsung pada pengurangan *Opex* nelayan. Fasilitas ini harus dijadikan pusat pelatihan praktis melalui kemitraan kurikulum dengan **Politeknik KP Kupang**.<sup>13</sup>
3. **Manajemen Sumber Daya Berbasis Sains:** Mengintegrasikan model peramalan canggih (Polynomial Orde 4/5)<sup>9</sup> ke dalam sistem informasi perikanan daerah untuk menyusun



kebijakan kuota dan musim tangkap yang adaptif. Data ini harus menjadi dasar perencanaan logistik, mitigasi risiko investasi, dan *Early Warning System* bagi komunitas nelayan.

### Karya yang dikutip

1. <https://kupangkab.bps.go.id>, diakses Oktober 21, 2025, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=IaqRveYtV5JD1g15kSmKB3QwL0l6NGwyL01FQktFWmRMMFQxQmFXyIBJeHVDTEg2V0FQT3EwR2RCS0VHZTc5RWUxYmlaM25mcIN2UVRIOFEyRU1FVkpah1hTVExhVVIVKy90am5CdW5iNjZrL04ybmkYn1U2cmZDMXZNY2E3MVVzZXVqUGdYOvhkTWRVLzRicWlhMkhpZEY3Tnkv29FY0FYeG5LcFhxbEJEWlhGS2RaejZUWVp0V0wxYXdPeFhuZE1rc3J4eDE2R24zV1cxYWRRUllPZ3hUOFpzNXJUSmlhdFhzaHZTekFCSWtnck5TclBubTh3MVVqN3VGL3d2R3BKNgh1cnh6TXpWN3p5NDM4YkZaFNtUEdKQ0c4Y0wrN3l2MVFHQnJ0bE9DdWVyaGVrRXI3UDZYc0ZFaDVoMjBDUkdmdGRoTmdlTkrHUEFY>
2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kupang Menurut Lapangan Usaha 2020–2024, diakses Oktober 21, 2025, <https://kupangkab.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/506e0490ccf48475f798adb0/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kupang-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>
3. Penyajian laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, diakses Oktober 21, 2025, <https://ppidutama.nttprov.go.id/storage/dokumen/OzXhK6Hsw4v3yC2S1bZTC1Xs85goQcUS8gnWuZXq.pdf>
4. BUPATI KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA ... - Peraturan BPK, diakses Oktober 21, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/138073/Perda%20No%2012%20Tahun%202019.pdf>
5. Indonesia Siapkan Lima Jurus Mengelola Ekonomi Biru, diakses Oktober 21, 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7556/indonesia-siapkan-lima-jurus-mengelola-ekonomi-biru>
6. Navigating the Blue Economy: Indonesia's Regional Efforts in ASEAN to Support Sustainable Practices in Fisheries Sector - MDPI, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/15/6906>
7. KOMPARASI IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN | Soesilo, diakses Oktober 21, 2025, <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/9967>
8. KAJIAN KONDISI DAN POTENSI PANGKALAN PENDARATAN ..., diakses Oktober 21, 2025, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JBP/article/view/13972>
9. MODEL PERAMALAN PRODUKSI PERIKANAN LAUT KOMODITAS UNGGULAN NTT DI KOTA KUPANG, diakses Oktober 21, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2427674&val=23215&title=Model%20Peramalan%20Produksi%20Perikanan%20Laut%20Komoditas%20Unggulan%20NTT%20Di%20Kota%20Kupang>
10. Menimbang Mengingat PERATURAN DAERAH ... - Peraturan BPK, diakses Oktober 21, 2025,

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/136782/PERDA%206%20TAHUN%202012%20TENTANG%20RETRIBUSI%20JASA%20USAHA.pdf>
11. PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK, diakses Oktober 21, 2025, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/12128/7536/111655>
  12. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DA - Jurnal Online UNJA, diakses Oktober 21, 2025, <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/download/4047/5978>
  13. BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN - KKP, diakses Oktober 21, 2025, <https://kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-lkj-politeknik-kp-kupang-tw-i-2025.pdf>
  14. Visi-Misi Pemda Ende Termuat dalam RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, diakses Oktober 21, 2025, <https://kupang.pom.go.id/berita/visi-misi-pemda-ende-termuat-dalam-rpjmd-kabupaten-ende-2014-2019>
  15. Kab. Kupang ttg Retribusi Jasa Usaha - DJPK Kemenkeu, diakses Oktober 21, 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/04/2.-Ev-Rpd-Kab.-Kupang-ttg-Ret.-Jasa-Usaha.pdf>
  16. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Membangun Negara Indonesia dari Wilayah Terluar - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.maritim.go.id/detail/sentra-kelautan-perikanan-terpadu-skpt-membangun-negara-indonesia>
  17. LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG Tahun 2024 - KKP, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-laporan-kinerja-stasiun-kipm-kupang-tahun-2024.pdf>
  18. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - E-Sakip Kukar, diakses Oktober 21, 2025, [https://sakip.kukarkab.go.id/uploads/dokumen/1740401844\\_LKJIP\\_2024\\_sign\\_sign.pdf](https://sakip.kukarkab.go.id/uploads/dokumen/1740401844_LKJIP_2024_sign_sign.pdf)
  19. Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dan - Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, diakses Oktober 21, 2025, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/download/706/971>
  20. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Terkait UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, mengenai retribusi izin usaha tertentu, apakah masuk retribusi izin usaha perikanan? - DJPK Kemenkeu, diakses Oktober 21, 2025, [https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb\\_post\\_type\\_1=terkait-uu-nomor-1-tahun-2022-tentang-hkpd-mengenai-retribusi-izin-usaha-tertentu-apakan-masuk-retribusi-izin-usaha-perikanan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=terkait-uu-nomor-1-tahun-2022-tentang-hkpd-mengenai-retribusi-izin-usaha-tertentu-apakan-masuk-retribusi-izin-usaha-perikanan)
  21. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan, diakses Oktober 21, 2025, <https://perikanan.pamekasankab.go.id/?p=3809>
  22. E-ISSN : 2723-6536 228 - Ejurnal Undana, diakses Oktober 21, 2025, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JBP/article/download/10394/5007/>
  23. PERENCANAAN MODEL DAN STRATEGI PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BIAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA | Hasan, diakses Oktober 21, 2025, <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/7778>

24. penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut - STISIPOL Raja Haji, diakses Oktober 21, 2025, <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/download/17/14/73>
25. Fishing for the triple bottom line: profit, planet — and people | UW News, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.washington.edu/news/2019/10/14/fishing-for-the-triple-bottom-line-profit-planet-and-people/>
26. Green Accounting: Penerapan Pentuple Bottom Line pada Industri Pengolahan Rumput Laut menuju Sustainability Development, diakses Oktober 21, 2025, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/download/5995/1850/21519>
27. Achieving the triple bottom line in the face of inherent trade-offs ..., diakses Oktober 21, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3625307/>
28. Optimalisasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang - Renewable Energy Issues, diakses Oktober 21, 2025, <https://egas.pubmedia.id/index.php/rei/article/download/8/6>
29. Determinan Nilai Tukar Nelayan Di Indonesia Dengan Pendekatan ..., diakses Oktober 21, 2025, <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/10940>
30. Ekonomi Biru - Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, diakses Oktober 21, 2025, <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-biru/>
31. The Blue Economy: Nature-Inspired Innovation for Future Growth, diakses Oktober 21, 2025, <https://www.suforall.org/en/post/the-blue-economy-innovation-inspired-by-nature>
32. Gunter Pauli: The Blue Economy - YouTube, diakses Oktober 21, 2025, [https://www.youtube.com/watch?v=W73\\_kGaDb5U](https://www.youtube.com/watch?v=W73_kGaDb5U)
33. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan - Neliti, diakses Oktober 21, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/241462-model-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-ne-b238362b.pdf>
34. Nilai Tukar Nelayan Dan Kontribusinya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung - Neliti, diakses Oktober 21, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/225532-nilai-tukar-nelayan-dan-kontribusinya-da-ba0a3f25.pdf>
35. ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH Lucy Auditya - eJournal UNIB, diakses Oktober 21, 2025, <https://ejournal.unib.ac.id/fairness/article/download/15274/7489/39315>
36. API PANDAWA (Aplikasi Pengelolaan Digital Pajak ... - Tuxedovation, diakses Oktober 21, 2025, [https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail\\_inovasi/141117](https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/141117)
37. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL - Neliti, diakses Oktober 21, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/165319-ID-implementasi-pelayanan-publik-berbasis-t.pdf>
38. PENGATURAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENERAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE), diakses Oktober 21, 2025, [https://repository.unsri.ac.id/87286/51/RAMA\\_74101\\_02012681923069\\_0021016304\\_0018077902\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/87286/51/RAMA_74101_02012681923069_0021016304_0018077902_01_front_ref.pdf)
39. PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, diakses Oktober 21, 2025,

<https://kepegawaian.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Peraturan-Pedoman-SOP-Permenpan-35-Tahun-2012.pdf>

40. Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good - Governance Terhadap Pembangunan Daerah di - Bappenas Working Papers, diakses Oktober 21, 2025, <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/205/105/>